

**DAMPAK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TERHADAP
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI
RIAU TAHUN 2015-2017**

Oleh: Ana Septiana

anaseptiana54@gmail.com

Pembimbing : Dr. Syafri Harto, M.Si

Referensi : 9 Jurnal, 24 Buku, 32 Website, dan 1 Skripsi

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 282994

Telp/ Fax. 0761-632777

Abstract

This research explain about the effect of ASEAN Economic Community (AEC) toward the foreign worker at Riau province. After the prevailing of MEA, there are an increase of foreign worker who came to Indonesia especially to Riau province, this phenomenon ocured due to of MEA has erase some obstacles in certain current such as product, service, investment, skill workers and of course those things will bring an effect itself after the prevailing of MEA toward the using of foreign worker at Riau province. The perspective used in this research is Liberalism Perspective with International Cooperation Theory. The data used in this research is secondary data that obtained through kinds of literature such as books, journals, newspapers, certain institution data and other document that support this research. The data obtained was selected and then being analyzed in a qualitative way and arranged in form of descriptive research report. The result of this research, after the prevailing of MEA toward the using of foreign worker at Riau province, it has either positive and negative effects. The negative effect such, MEA create such a competition between foreign and local worker, MEA could make a foreign worker who came to Indonesia to replace the position of local worker in a work field, therefore the positive effect of MEA is we would have a lot of foreign investment coming and there will be a transfer in terms of technology and knowledge in the future.

Keyword: ASEAN Economic Community (AEC), foreign worker, ASEAN, Riau Province

Pendahuluan

Tulisan ini akan menjabarkan mengenai dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Riau tahun 2015-2017. Globalisasi adalah sebuah proses yang mendunia, dimana proses tersebut meliputi secara keseluruhan sehingga mengakibatkan tidak adanya batas-batas yang mengikat. Dalam keadaan global semua arus yang masuk sulit untuk di kontrol dan dihalangi. Globalisasi mengaburkan batas-batas suatu negara menjadi sempit dikarenakan kemudahan yang didapat untuk berinteraksi dengan negara lain. Globalisasi membuat penduduk di dunia terhubung dalam sebuah dunia yang tunggal dan dalam komunitas yang global.

Globalisasi memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Sektor-sektor yang dipengaruhi globalisasi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya

Negara yang telah terbuka karena arus globalisasi membuat negara mudah dalam memenuhi kepentingan negara tersebut. Salah satu bentuk nyata dari terbukanya suatu negara saat ini adalah banyaknya negara-negara yang melakukan kerjasama, salah satunya adalah ASEAN. Berbagai kerjasama digalang oleh negara-negara anggota ASEAN sampai tiba momentum di tahun 2003 dalam pertemuan ke-9 di Bali, dimana seluruh pemimpin negara anggota ikut mendeklarasikan kesepakatannya membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejak

2007 sebuah Cetak Biru (*blueprint*) dari rencana induk MEA digodok sehingga akhirnya disepakati untuk dijalankan mulai tahun 2015.

Cetak Biru ini adalah target yang akan dicapai bersama sebagai sebuah komunitas yang kuat di Asia Tenggara. Adapun tujuan ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.¹ MEA merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN II yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 15 Desember 1997.

Ketika MEA sudah diberlakukan di anggota negara-negara ASEAN artinya saat ini negara ASEAN dapat menjual barang dan jasa ke negara lain dengan mudah. Konsekuensi yang ditimbulkan dari MEA adalah dampak aliran bebas barang bagi negara ASEAN, dampak arus bebas investasi, dampak arus bebas modal, dampak arus bebas jasa dan dampak arus bebas tenaga kerja profesional.²

¹Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Pasar Bebas Asean: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," Kementerian Perdagangan, <http://ftacenter.kemendag.go.id/pdf/publikasi/peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf> (diakses 18 September 2018)

²G.T Suroso, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia," Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545masyarakatekonomiaseanmead>

Adapun tujuan ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.³ MEA merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN II yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 15 Desember 1997. Para anggota negara ASEAN sepakat mewujudkan Masyarakat ASEAN yang dimulai tahun 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki tiga hal kesepakatan diantaranya sepakat menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi serta melakukan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Yang kedua, mempercepat jalannya liberalisasi dalam perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga meningkatkan tenaga kerja terampil secara bebas di kawasan ASEAN.⁴

Ketika MEA sudah diberlakukan di anggota negara-negara ASEAN artinya saat ini negara ASEAN dapat menjual barang dan jasa ke negara lain

dengan mudah. Konsekuensi yang ditimbulkan dari MEA adalah dampak aliran bebas barang bagi negara ASEAN, dampak arus bebas investasi, dampak arus bebas modal, dampak arus bebas jasa dan dampak arus bebas tenaga kerja professional.⁵ Tenaga kerja dari negara lain dapat bebas masuk dan bekerja di Indonesia begitu pun tenaga kerja Indonesia bebas bekerja di negara-negara ASEAN.

Tenaga kerja dari negara lain dapat bebas masuk dan bekerja di Indonesia begitu pun tenaga kerja Indonesia bebas bekerja di negara-negara ASEAN. Indonesia tidak dapat menghindari kedatangan tenaga kerja asing, tenaga kerja asing yang bermigrasi ke Indonesia telah menimbulkan tantangan tersendiri karena kedatangannya mengancam tenaga kerja Indonesia. Jumlah tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan. Tenaga kerja asing yang datang telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Riau merupakan daerah yang tidak terlepas menjadi sasaran tenaga kerja asing. Riau adalah daerah yang dekat dengan perbatasan Malaysia dan Singapura. Selain itu Riau merupakan daerah yang memiliki banyak perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah.

an-perekonomian-indonesia (diakses 15 September 2018)

³Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Pasar Bebas Asean: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," Kementerian Perdagangan, <http://ftacenter.kemendag.go.id/pdf/publikasi/peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf> (diakses 18 September 2018)

⁴Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "Menuju ASEAN Economic Community," (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013), hal. 3

⁵G.T Suroso, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia," Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia> (diakses 15 September 2018)

Kerangka Teoritis

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah liberalisme, perspektif ini muncul setelah Perang Dunia 1. Liberalisme berpandangan optimis atas sifat dasar manusia. Jackson dan Sorensen berpendapat mengenai tiga asumsi dasar liberalisme yaitu:⁶

1. Pandangan positif tentang manusia
2. Keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual
3. Percaya terhadap kemajuan

Kaum liberal mengakui bahwa setiap individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa dengan adanya banyak kepentingan yang berbeda antar individu, dapat dibentuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan dan kerjasama yang dibentuk, semakin kecil kemungkinan terjadinya perang.

Ilmuwan Liberalisme percaya bahwa hubungan antarnegara akan berjalan dengan baik dengan adanya perdamaian yang diwujudkan oleh setiap negara, yang kemudian dapat terwujud dengan hadirnya organisasi internasional sebagai media pemersatu bangsa. Karena itu terlihat bahwa liberalisme tidak melihat hanya negara sebagai aktor yang dominan dalam HI tetapi juga individu dan organisasi internasional sebagai aktor dalam interaksi antar negara.⁷ Proyeksi liberalisme ke

a. Persepektif Liberalisme

dalam dunia internasional adalah negara saling bekerja sama dalam bentuk kolaborasi dan kooperasi dengan tujuan untuk menciptakan atmosfer yang mendukung perdamaian dunia, hal inilah yang membentuk agenda utama liberalisme.

Setiap negara saat ini pasti memiliki kerjasama dengan negara lain, hal ini dikarenakan negara membutuhkan bantuan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Integrasi dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Suatu negara akan membentuk kerjasama dengan negara-negara lain berdasarkan kawasan tertentu dan akan sering membentuk institusi-institusi untuk menjamin kepentingan negara-negara satu kawasan. Misalnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (*Assosiation of South East Asian Nation*) di kawasan Asia Tenggara, APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) di kawasan Asia Pasifik, EEC (*Europe Economic Community*) di kawasan Eropa, MERCOSUR (*Common Market of the South*) di kawasan Amerika Latin, dan lain sebagainya.

Tingkat Analisa: Kelompok

Menurut Mochtar Mas'oe'd membagi level analisa menjadi lima tingkat yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, perilaku negara-bangsa, dan perilaku sistem internasional.⁸ Level analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini

⁶Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to Internasional Relations* (Oxford: University Press, 1999), hal. 144

⁷ Ibid., hal. 127

⁸Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta, LP3ES, 1990), hal. 40

adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok diasumsikan sebagai individu yang umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Artinya peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu melainkan kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, dan sebagainya) dan oleh organisasi birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Dengan demikian untuk memahami hubungan internasional kita harus mempelajari perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Perilaku kelompok inilah sebagai aktor yang mempengaruhi para pengambil keputusan atau kebijakan. Artinya dalam penelitian ini ASEAN sebagai kelompok dalam menyebarkan paham MEA kepada negara-negara anggotanya sehingga mengakibatkan tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri dapat mempengaruhi suatu negara atau pemerintah dalam mengambil kebijakan.

a. Teori Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kerjasama internasional oleh K.J Holsti. Kerjasama internasional diperlukan oleh sebuah negara karena negara tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan kerjasama untuk saling membantu dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Menurut K.J Holsti proses kerjasama internasional terbentuk karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang

timbul dan memerlukan perhatian dari negara-negara. Kerjasama internasional didefinisikan sebagai berikut⁹:

- a. pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Koesnadi menambahkan kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional¹⁰. Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara Barat kebanyakan bercirikan Interdependensi Kompleks. Ketika

⁹M. Tahrir, trans., K.J Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, (Jakarta: Erlangga, 1988), 652-653.

¹⁰Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional* (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977), hal. 19

negara memiliki derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi tersebut memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi tersebut dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.¹¹

Hasil dan Pembahasan Tinjauan Umum dan Kondisi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau sumatera bagian tengah. Riau merupakan provinsi terluas ke-6 di Indonesia. Riau dikenal dengan tanahnya orang melayu. Hingga tahun 2004 daerah yang meliputi Riau yakni Kepulauan Riau, Pulau Batam, Pulau Bintan dan pulau-pulau kecil lainnya. Namun pulau Batam dan Kepulauan Riau di mekarkan menjadi provinsi tersendiri pada tahun 2004 dan terpisah dengan Riau.¹² Pada awal pembentukannya Riau hanya terdiri atas 16 kabupaten namun setelah pemekaran Riau hanya memiliki 12 kabupaten.

Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa Portugis “Rio” yang berarti sungai¹³. Menurut

sastrawan Hasan Junus keturunan langsung dari Raja Ali Haji mengatakan ada 3 kemungkinan asal-usul penyebutan Riau. Pertama Riau berasal dari penyebutan orang Portugis “Rio” yang berarti sungai, kedua tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab *Alfu Laila Wa Laila* menyebut “Riahi” yang artinya air laut ditujukan untuk suatu tempat di Pulau Bintan. Ketiga, diambil dari kata “Rioh atau Riu” yang berasal dari ucapan masyarakat setempat yang berarti hiruk pikuk ramai orang bekerja¹⁴.

Kondisi Tenaga Kerja Lokal di Provinsi Riau

Para pekerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh masyarakat dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Disusul dengan lulusan SMA yang berjumlah 629.031 ribu orang. Tenaga kerja yang paling banyak di Provinsi Riau di dominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari kualitas tenaga kerjanya melalui tingkat pendidikan. Tenaga kerja lokal di Provinsi Riau memiliki kualitas yang masih rendah karena tenaga kerja yang berpendidikan S1 dan Diploma masih banyak yang belum terserap. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya.

Jumlah tenaga kerja yang pengangguran di Riau masih banyak yang belum terserap. Kondisi tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di Provinsi Riau juga masih banyak

¹¹Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 63-64.

¹²Suwardi MS, *Budaya Melayu dalam perjalanannya menuju masa depan* (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI-Riau, 1991) hal 9.

¹³Ibid.,

¹⁴Haris Kurniawan, “Asal Mula Nama Provinsi Riau” <https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-mula-nama-provinsi-riau.html> (diakses 30 Januari 2019)

yang belum mengantongi sertifikasi, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja lokal yang mendapatkan gaji dibawah standar UMP. Sumber daya manusia yang dimiliki Riau memang banyak namun belum cukup mumpuni dalam mengelola sumber daya alamnya. Hal ini disebabkan lamanya proses sertifikasi dan pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja. Sebanyak 15000 orang yang bekerja pada perusahaan pengeboran migas di Provinsi Riau belum memiliki sertifikasi kompetensi. Jumlah yang sudah mengikuti program sertifikasi baru mencapai 10%.¹⁵ Belum tersertifikasinya para pekerja disebabkan oleh panjangnya antrian untuk mengikuti sertifikasi.

Kondisi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Riau

Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia khususnya Provinsi Riau pada masa sebelum adanya MEA jumlahnya tidak begitu signifikan. Karena pada masa itu belum banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Riau meskipun jumlahnya di Indonesia dapat dikatakan cukup banyak. Jumlah tenaga kerja asing dalam rentang waktu pada tahun 2008 sampai 2014 masih dibawah 500 orang. Pada tahun 2008 berjumlah 193 orang, tahun 2009 berjumlah 182 orang, tahun 2010 berjumlah 165 orang, tahun 2011 berjumlah 253 orang, tahun 2012 berjumlah 397 orang, dan pada tahun 2013 berjumlah 171 orang.¹⁶ Jumlahnya yang fluktuatif

atau naik turun disebabkan oleh permintaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Riau. Hal ini disebabkan proyek yang sedang dibangun dan tenaga kerja asing yang dibutuhkan perusahaan hanya bekerja sesuai dengan masa kontrak yang berlaku.

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Kedatangan tenaga kerja asing telah menjadi fenomena yang sudah biasa sejak munculnya globalisasi dan dimulainya industrialisasi. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sendiri terus mengalami perkembangan mulai dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini.¹⁷ Setiap tenaga kerja asing yang datang ke dalam negeri tentu tidak bisa bebas bekerja dikarenakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini berlaku di setiap negara dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai kalangan. Mempekerjakan tenaga kerja asing juga harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah dibuat. Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh menteri. RPTKA ini merupakan dokumen awal yang harus disiapkan pemberi kerja yang berisi rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat

¹⁵Dinas ESDM Provinsi Riau, "15 Ribu Pekerja Sektor Migas di Riau Belum Tersertifikasi"
<https://esdm.riau.go.id/web/index.php/berita/186-15-ribu-pekerja-sektor-migas-di-riau-belum-tersertifikasi> (diakses 4 Maret 2019)

¹⁶Bank Indonesia, "Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia"

https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/lainnya/Pages/SurveiTKAIndonesia_09.aspx
(diakses 5 Maret 2019)

¹⁷Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori* (Medan, USU Press, 2010), hal. 103

yang ditunjuk yang berguna sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Menggunakan TKA (IMTA). Tenaga kerja asing yang hendak bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin

Sejarah Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam perkembangan selanjutnya ASEAN mulai sepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh kepala negara ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1997. ASEAN sendiri dibentuk dengan beberapa tujuan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 di Bali tahun 2003 yaitu menyepakati pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Community). Masyarakat Ekonomii ASEAN adalah salah satu pilar yang terdapat pada ASEAN Community. Adapun pilar-pilar ASEAN Community itu adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Pilar Politik-Keamanan (ASEAN Political-Security Community)
2. Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)
3. Pilar sosial budaya (ASEAN Socio-Cultural Community)

Peran ASEAN dalam Memajukan Mobilitas Tenaga Kerja

Dalam rangka mempromosikan integrasi ekonomi, Cetak Biru (*Blueprint*) MEA

¹⁸Ibid.,

masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan visa bekerja dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

menjabarkan tindakan-tindakan spesifik untuk melaksanakan hal ini yaitu memfasilitasi penerbitan visa dan izin kerja serta berupaya menyelaraskan dan menstandarisasi kualifikasi. Cetak Biru MEA mengamanatkan pengurangan, standarisasi persyaratan dokumen dan perbaikan pengakuan bersama atas kualifikasi professional. Namun dalam melaksanakan kemajuan mobilitas tenaga kerja masih terbatas. Langkah penting yang diambil adalah dengan menyelenggarakan pengakuan bersama dimana negara-negara harus sepakat untuk mengakui kualifikasi professional dan memfasilitasi tenaga kerja profesional di bidang terkait. Namun lapangan pekerjaan yang diakui masih 5 persen dari lapangan kerja di negara-negara ASEAN seperti tenaga dokter, dokter gigi, perawat, insinyur, arsitek, akuntan dan tenaga kerja professional pariwisata.

Dalam Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran tahun 2007 (Deklarasi Cebu mengenai Pekerja Migran), negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempromosikan martabat pekerja migran termasuk pekerja non prosedural dan untuk menjabarkan kewajiban dari negara-negara penerima dan pengirim dan dari ASEAN itu sendiri.¹⁹

¹⁹Mauro Testaverde, et all, "Migrasi Untuk Mencari Peluang: Mengatasi Rintangan terhadap Mobilitas Tenaga Kerja di Asia Tenggara" World Bank

Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Riau

Ketika Indonesia telah bergabung ke dalam ASEAN bersedia atau tidak Indonesia harus mengikuti segala bentuk perjanjian kerjasama yang telah dibuat. Di Provinsi Riau tenaga kerja asing yang datang tidak dapat dihindari dikarenakan MEA yang mengatur sistem untuk tidak ada lagi batas-batas negara mencakup tenaga kerja, barang dan jasa. Bebasnya pergerakan manusia, barang dan jasa antar negara akan menghasilkan kerja sama yang baik dan saling melengkapi. Dengan berlakunya MEA pada tahun 2015 membuat angka tenaga kerja asing di Riau terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja asing yang datang mencapai 578 orang, data tersebut dikatakan cukup besar mengingat jumlah angka pengangguran di Riau masih tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah TKA dari berlakunya MEA cukup besar untuk membawa pengaruhnya bagi Provinsi Riau.

Disamping memiliki dampak negatif, dampak MEA terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Riau juga membawa dampak positif. Dari hasil pengamatan dan analisis data, dampak positif tersebut meliputi MEA mendatangkan Lebih Banyak Investasi Asing ke Provinsi Riau, Terjadinya Perpindahan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, serta dengan adanya MEA, TKA yang datang dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja profesional dan terampil di Provinsi Riau.

Peningkatan jumlah tenaga kerja asing dengan berlakunya MEA tentu memiliki dampak negatif tersendiri di Provinsi Riau. Adapun dampak negatif tersebut meliputi diberlakukannya MEA ditambah dengan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mengakibatkan persaingan semakin ketat, TKA dapat menggeser lapangan pekerjaan tenaga kerja lokal, dan retribusi dari perpanjangan IMTA (Izin Menggunakan TKA) tidak memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis akan menjelaskan kesimpulan mengenai dampak yang terjadi dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap tenaga kerja asing di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini penulis mengukur dampak yang terjadi dengan cara mengukur jumlah TKA di Riau dengan berlakunya MEA. Provinsi Riau merupakan daerah industri berupa migas dan kertas yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pemerintah Riau. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri menjadi daya tarik bagi investor maupun tenaga kerja asing untuk mencari pekerjaan. Dengan adanya MEA yang diberlakukan pada tahun 2015 mempunyai tujuan untuk membuat pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat di kawasan ASEAN. Tujuan MEA adalah

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28342/211106ovIndonesia_n.pdf?sequence=3&isAllowed=y (diakses 20 Maret 2019)

dengan meminimalisir atau menghilangkan hambatan-hambatan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Hambatan-hambatan tersebut berupa bea cukai impor barang, jasa, dan investasi termasuk tenaga kerja terampil.

Dengan adanya MEA negara-negara ASEAN harus lebih membuka arus barang, jasa dan investasi serta tenaga kerja terampil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan tenaga kerja asing. Setelah berlakunya sebelum tahun 2015, tenaga kerja asing yang datang tidak lebih dari 500 orang. Namun setelah MEA berlaku pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja asing di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Tenaga kerja asing yang datang berasal dari berbagai negara, seperti Cina, Malaysia, India, Filipina, Kamboja, Thailand dan lain sebagainya. Tenaga kerja yang datang tentu saja tenaga kerja yang terampil dan memiliki skill sehingga mereka ditempatkan pada jabatan-jabatan ahli seperti manajer, konsultan, profesional, supervisor, teknisi dan direktur. Tenaga kerja asing tersebut tersebar di berbagai perusahaan besar seperti PT. Riau Andalan Pulp & Paper, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Chevron Pacific Indonesia, PT. Energi Sejahtera Mas dan perusahaan kecil lainnya.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal, mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini penulis menemukan dampak positif dan negatif dengan adanya MEA yang membuat pergerakan lintas batas manusia antar negara. Fenomena adanya mobilitas tenaga kerja asing ke Indonesia juga membawa dampak positif bagi Provinsi Riau. Dengan adanya MEA dapat menambah investasi yang berasal dari tenaga kerja asing bagi pemerintah Provinsi Riau. Dari tahun 2016 hingga 2018 nilai investasi asing yang masuk menunjukkan peningkatan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang baik untuk menambah pendapatan daerah. Selain itu dengan berlakunya MEA tenaga kerja asing yang datang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional dan terampil, serta mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempercepat proses pembangunan daerah sesuai dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing yang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Meskipun dengan adanya MEA tenaga kerja asing yang datang dapat menggeser lapangan kerja lokal, keberadaan tenaga kerja asing di Provinsi Riau tidak memberikan pengaruh negatif yang besar, karena pemerintah menjaga kualitas dan menjamin lapangan kerja lokal dengan cara menunjuk tenaga kerja pendamping sebagai alih teknologi dan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, USU Press, Medan

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Pasar Bebas Asean: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)." Kementerian Perdagangan. <http://ftacenter.kemendag.go.id/pdf/publikasi/peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf> (diakses 18 September 2018).

Suroso, GT. "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia." Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia> (diakses 15 September 2018).

Buku

Jackson, Robert & Georg Sorensen. *Introduction to Internasional Relations*. Oxford: University Press, 1999.

Jackson, Robert & Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mas'oeed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Displin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Kartasasmita, Koesnadi. *Administrasi Internasional*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. Bandung, 1977.

MS, Suwardi. *Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan*. Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI-Riau, 1991.

Website

Bank Indonesia. "Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia." https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/lainnya/Pages/SurveiTKAIndonesia_09.aspx (diakses 5 Maret 2019).

Kurniawan, Haris. "Asal Mula Nama Provinsi Riau." <https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-mula-nama-provinsi-riau.html> (diakses 30 Januari 2019).

Dinas ESDM Provinsi Riau. "15 Ribu Pekerja Sektor Migas di Riau Belum Tersertifikasi." <https://esdm.riau.go.id/web/index.php/berita/186-15-ribu-pekerja-sektor-migas-di-riau-belum-tersertifikasi> (diakses 4 Maret 2019)

Testaverde, Mauro. "Migrasi Untuk Mencari Peluang"

Mengatasi Rintangan terhadap
Mobilitas Tenaga Kerja di Asia
Tenggara.” World Bank.
<https://www.worldbank.org/in/newspressrelease/2017/10/09/managing->

[migration-better-can-help-boost-welfare-and-growth-in-asean-world-bank](https://www.worldbank.org/in/newspressrelease/2017/10/09/managing-migration-better-can-help-boost-welfare-and-growth-in-asean-world-bank) (diakses 20 Maret 2019).